

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi yang penting dan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Akterujjaman (2010) peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian sebagai salah satu kekuatan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kelebihan UMKM adalah mampu bertahan dalam menghadapi kondisi krisis. Di Indonesia, UMKM telah terbukti mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008 (Ester Meryana, 2012). Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh pelaku UMKM pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerja (Putra and Saskara, 2013).

Peran UMKM dalam tata perekonomian nasional sudah tidak diragukan lagi, dengan melihat kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional. Berita industri pada website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Tak hanya itu, sektor UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 % menjadi 97,22 % dalam periode lima tahun terakhir. UMKM memberikan kontribusi tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk ekspor secara signifikan, sehingga mendapatkan penghasilan devisa bagi negara, sehingga membuat sektor ini muncul sebagai pilar yang sangat kuat baik dari segi pendapatan daerah dan dalam hal tenaga kerja (Subramanian and Nehru, 2012).

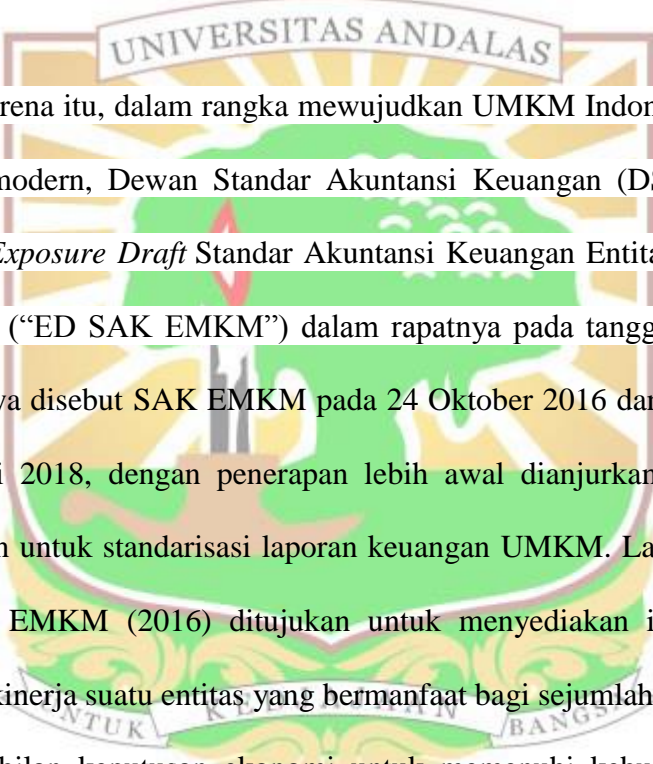
Namun, perkembangan UMKM yang semakin pesat tidak diimbangi dengan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan usaha lainnya. Perkembangan UMKM yang pesat berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang semakin ketat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan (*rate of return*) yang diperoleh mengarah pada kondisi dimana pengeluaran untuk keperluan produksi sama dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi serta untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global (Zhang and Ye, 2010).

Disamping itu, dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pelaku UMKM menghadapi permasalahan yang membuat UMKM sulit berkembang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2015) terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa dalam UMKM.

Menurut Hidayat (2004), pelaku UMKM merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya. Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. Pencatatan dilakukan hanya dengan menghitung selisih antara uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka. Namun seperti yang dijabarkan di empat permasalahan pada paragraf sebelumnya, praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Semakin berkembangnya usaha, menuntut UMKM untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan, UMKM akan berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UMKM.



Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal **18 Mei 2016** yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018, dengan penerapan lebih awal dianjurkan. SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan UMKM. Laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016) ditujukan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor.

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya,

SAK EMKM ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Karena harapan dari penerbitan SAK EMKM ini adalah untuk membantu dalam pengembangan UMKM di Indonesia, maka seharusnya SAK EMKM ini diimplementasikan secara optimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mengetahui adanya SAK EMKM ini sehingga belum dilaksanakan dengan optimal. Salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Barat.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I 2017 tumbuh sebesar 4,91%, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 4,86%, setelah berada pada posisi kedelapan di triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di urutan kelima untuk wilayah Sumatera pada triwulan I 2017 (Bank Indonesia, 2017). Prestasi ini diyakini tidak terlepas dari peran serta UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berikut merupakan data jumlah UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah			
		Usaha mikro (unit)	Usaha kecil (unit)	Usaha menengah (unit)	Total (unit)
1	Kab. Lima Puluh Kota	271	4.973	43.679	48.923
2	Kab. Solok Selatan	40	913	8.952	9.905
3	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
4	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613



No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah			
		Usaha mikro (unit)	Usaha kecil (unit)	Usaha menengah (unit)	Total (unit)
5	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7	Kab. Solok	247	4.426	35.437	40.110
8	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.340
9	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479
11	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12	Kab.Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.920
19	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
Jumlah		4.876	109.662	433.940	548.478

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, tahun 2015*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Barat mencapai 548.478 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat pada tahun 2015. Dan pelaku UMKM tertinggi berada di Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 76.236 pelaku UMKM pada tahun 2015. Melihat tingginya jumlah UMKM yang tersebar di Sumatera Barat khususnya Kota Padang maka sudah seharusnya para

pelaku UMKM memahami dan melaksanakan pemberlakuan SAK EMKM untuk menunjang usahanya.

Berdasarkan harapan dan tujuan dari penerbitan SAK EMKM oleh IAI, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam akuntansi dan khususnya yang berdasar pada SAK EMKM, serta mengukur tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM untuk menunjang usahanya. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini dengan “**Analisis**

### **Tingkat Pemahaman dan Tingkat Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK EMKM dalam Pelaporan Keuangan di Kota Padang”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengguna SAK EMKM dalam hal ini pelaku UMKM telah memahami perlakuan akuntansi untuk entitas yang menggunakan SAK EMKM?
2. Apakah pengguna SAK EMKM dalam hal ini pelaku UMKM telah siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengguna SAK EMKM dalam hal ini UMKM telah memahami perlakuan akuntansi untuk entitas yang menggunakan SAK EMKM.

2. Untuk mengetahui apakah pengguna SAK EMKM dalam hal ini UMKM telah siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi khususnya mengenai implementasi SAK EMKM dalam penyajian laporan keuangan.

3. Bagi DSAK IAI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi DSAK IAI untuk melihat seberapa paham dan siapkah UMKM dalam menerapkan SAK EMKM sebagai dasar Pelaporan Keuangan UMKM, DSAK IAI dapat menilai langkah sosialisasi apa yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesiapan pelaku UMKM tersebut.

